



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
INSPEKTORAT

Pemalang, 12 April 2022

Nomor : 700/31/REV/IV/2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Reviu PMPRB pada  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Pemalang

Kepada Yth.  
Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang  
Cq. Kepala Bagian Administrasi  
Pembangunan Setda Kab. Pemalang  
di –

PEMALANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, kami telah melakukan Reviu atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang. Reviu dilakukan sebagai wujud dari komitmen dan konsistensi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), monitoring dan evaluasi RB, serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Nilai hasil reviu yang diperoleh merupakan nilai PMPRB yang telah direviu oleh Tim Pereviu Inspektorat Kabupaten Pemalang sesuai dengan data dukung yang disampaikan (sampai dengan tanggal 31 Maret 2022) serta implementasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang. Dari hasil reviu yang dilakukan, diperoleh nilai hasil reviu PMPRB Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang sebesar 19,32 dari bobot nilai 36,30 (53,22%).

Adapun rincian perolehan nilai PMPRB dari hasil reviu PMPRB oleh Inspektorat dibandingkan dengan hasil PMPRB yang dilakukan oleh asesor internal Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

| No                                     | Area Perubahan                            | Bobot        | PMPRB        |              | Hasil Reviu  |              |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |   |              | Nilai        | %            | Nilai        | %            |
| <b>Pemenuhan</b>                       |   | <b>14,60</b> | <b>11,87</b> | <b>81,28</b> | <b>7,87</b>  | <b>53,93</b> |
| 1                                      | Manajemen Perubahan                       | 2,00         | 1,87         | 93,40        | 1,44         | 71,87        |
| 2                                      | Deregulasi Kebijakan                      | 1,00         | 1,00         | 100,00       | 0,75         | 75,00        |
| 3                                      | Penataan dan Penguatan Organisasi         | 2,00         | 1,95         | 97,50        | 1,17         | 58,50        |
| 4                                      | Penataan Tata Laksana                     | 1,00         | 0,76         | 76,00        | 0,55         | 54,67        |
| 5                                      | Penataan Sistem Manajemen SDM aparaturnya | 1,40         | 1,18         | 84,14        | 0,92         | 65,48        |
| 6                                      | Penguatan Akuntabilitas                   | 2,50         | 2,17         | 86,80        | 1,48         | 59,20        |
| 7                                      | Penguatan Pengawasan                      | 2,20         | 1,56         | 70,97        | 0,53         | 23,89        |
| 8                                      | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik     | 2,50         | 1,38         | 55,21        | 1,05         | 41,91        |
| <b>Reform</b>                          |   | <b>21,70</b> | <b>13,75</b> | <b>63,34</b> | <b>11,44</b> | <b>52,73</b> |
| 1                                      | Manajemen Perubahan                       | 3,00         | 2,04         | 68,00        | 0,92         | 30,50        |
| 2                                      | Deregulasi Kebijakan                      | 2,00         | 1,00         | 50,00        | 1,50         | 75,00        |
| 3                                      | Penataan dan Penguatan Organisasi         | 1,50         | 1,50         | 100,00       | 0,75         | 50,00        |
| 4                                      | Penataan Tata Laksana                     | 3,75         | 2,13         | 56,67        | 1,65         | 43,93        |
| 5                                      | Penataan Sistem Manajemen SDM aparaturnya | 2,00         | 1,00         | 50,00        | 1,25         | 62,50        |
| 6                                      | Penguatan Akuntabilitas                   | 3,75         | 1,78         | 47,60        | 1,62         | 43,27        |
| 7                                      | Penguatan Pengawasan                      | 1,95         | 1,80         | 92,10        | 1,29         | 66,05        |
| 8                                      | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik     | 3,75         | 2,50         | 66,67        | 2,47         | 65,88        |
| <b>Total Nilai Komponen Pengungkit</b> |   | <b>36,30</b> | <b>25,61</b> | <b>70,56</b> | <b>19,32</b> | <b>53,22</b> |

Catatan :

Perbedaan % dimungkinkan karena adanya pembulatan nilai dalam LKE

Berdasarkan reviu terdapat catatan untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen, peran/keterlibatan serta pemahaman seluruh pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah.
2. Mensosialisasikan dan menginternalisasi Road Map - Rencana Kerja Reformasi yang telah ditetapkan kepada seluruh pegawai
3. Meningkatkan kapasitas/kompetensi asesor dalam melaksanakan PMPRB, serta dalam memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah
4. Menginternalisasi budaya kerja dan nilai-nilai organisasi dalam rangka pembangunan budaya kinerja yang berintegritas kepada seluruh pegawai secara berkelanjutan, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas implementasinya.

5. Mengoptimalkan peran Agen Perubahan dalam memberikan kontribusi perubahan yang nyata di lingkungan Sekretariat Daerah
6. Menyusun peta keterkaitan produk hukum daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan kebijakan lainnya termasuk analisis unsur kemudahan dan efisiensi dalam pemberian pelayanan di Sekretariat Daerah
7. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik
8. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan mendorong penerapan transformasi digital dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian sasaran dan target manfaat/ dampak dari proses bisnis utama maupun pemberian layanan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan
9. Melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi seluruh pegawai, dan melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi untuk meminimalisir *gap* kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan
10. Melakukan internalisasi aturan disiplin/kode etik/aturan perilaku yang telah ditetapkan, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapannya
11. Menyusun kerangka logis kinerja berdasarkan isu strategis dengan menyusun pohon masalah dan cascading kinerja serta menggunakannya dalam penjabaran kinerja (penyusunan Perjanjian Kinerja) seluruh pegawai, bukan hanya di tingkat pejabat struktural
12. Melaksanakan *public campaign* gratifikasi secara berkala, baik kepada internal pegawai maupun pengguna layanan
13. Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern, melakukan proses identifikasi dan analisis risiko beserta rencana tindak pengendaliannya
14. Mensosialisasikan sistem penanganan pengaduan internal (*whistleblowing system*), termasuk penggunaan aplikasinya, kepada seluruh pegawai
15. Mensosialisasikan identifikasi potensi benturan kepentingan yang telah ditetapkan kepada seluruh pegawai, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasinya
16. Mendorong tingkat kepatuhan ASN dalam pelaporan harta kekayaan (LHKASN)
17. Secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan/SOP yang sudah ditetapkan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan, dengan memanfaatkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan
18. Mendorong pelaksanaan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan yang diberikan

19. Menetapkan unit pengelola/petugas khusus untuk konsultasi dan pengaduan, melaksanakan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan, serta mengevaluasi penanganan keluhan/masukan atas layanan yang diberikan
20. Melengkapi dokumen bukti dukung implementasi RB sesuai tiap pernyataan dalam Lembar Kerja Evaluasi RB.
21. Menjadikan nilai hasil reuiu sebagai dasar dalam meng-input nilai PMPRB secara online.

Demikian yang dapat kami sampaikan, laporan disusun sesuai dengan hasil reuiu dan dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan Standar Audit dan Kode Etik Auditor Internal Pemerintah Indonesia. Kami mengharapkan agar Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang beserta seluruh pegawai memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.

INSPEKTUR KABUPATEN PEMALANG



*[Handwritten Signature]*

EKO EDI PRIHARTANTO, SH, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651104 199403 1 008

Tembusan : Kepada Yth

1. Bupati Pemalang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang;
4. Kasubag Adum pada Inspektorat Kabupaten Pemalang.

## LAMPIRAN

Hasil Reviu PMPRB pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang

| Penilaian  | Bobot | Hasil Reviu | Nilai | %      |
|--|-------|-------------|-------|--------|
| A. PENGUNGKIT  | 36,30 |             | 19,32 | 53,22% |
| L. PEMENUHAN   | 14,60 |             | 7,87  | 53,93% |
| 1. MANAJEMEN PERUBAHAN   | 2,00  |             | 1,44  | 71,87% |
| i. Tim Reformasi Birokrasi   | 0,40  |             | 0,31  | 78,00% |
| a. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk  |       | A           | 1,00  |        |
| b. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja   |       | B           | 0,67  |        |
| c. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti |       | B           | 0,67  |        |
| ii. Road Map Reformasi Birokrasi   | 0,40  |             | 0,29  | 72,33% |
| a. Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan  |       | Ya          | 1,00  |        |
| b. Telah terdapat sosialisasi/Internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi  |       | B           | 0,67  |        |
| c. Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja selaras dengan Road Map  |       | B           | 0,50  |        |
| iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi   | 0,80  |             | 0,57  | 71,00% |
| a. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku  |       | B           | 0,67  |        |
| b. Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB   |       | A           | 1,00  |        |
| c. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan  |       | B           | 0,50  |        |
| d. Penanggungjawab RB internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja  |       | B           | 0,67  |        |
| iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja  | 0,40  |             | 0,27  | 67,00% |
| a. Terdapat keterlibatan pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi  |       | B           | 0,67  |        |
| b. Terdapat upaya untuk menggerakkan unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan <i>agent of change</i> ataupun <i>role model</i>                             |       | B           | 0,67  |        |

|                                      |   |      |   |      |        |
|--------------------------------------|---|------|---|------|--------|
| 2. DEREGULASI KEBIJAKAN              |   | 1,00 |   | 0,75 | 75,00% |
| - Harmonisasi                        |   | 1,00 |   | 0,75 | 75,00% |
|                                      | a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus |      | B | 0,50 |        |
|                                      | b. Telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat   |      | A | 1,00 |        |
| 3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI |   | 2,00 |   | 1,17 | 58,50% |
| i. Evaluasi Kelembagaan              |   | 1,00 |   | 0,50 | 50,00% |
|                                      | a. Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi   |      | B | 0,50 |        |
|                                      | b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi  |      | B | 0,50 |        |
|                                      | c. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi  |      | B | 0,50 |        |
|                                      | d. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan                                |      | B | 0,50 |        |
|                                      | e. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit kerja di atasnya  |      | B | 0,50 |        |
|                                      | f. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya                                      |      | B | 0,50 |        |
|                                      | g. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan                           |      | B | 0,50 |        |
|                                      | h. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat /kewenangan   |      | B | 0,50 |        |
|                                      | i. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan unit kerja lain  |      | B | 0,50 |        |
|                                      | j. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis                     |      | B | 0,50 |        |
| ii. Tindak Lanjut Evaluasi           |   | 1,00 |   | 0,67 | 67,00% |
|                                      | a. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi  |      | B | 0,67 |        |
|                                      | b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi   |      | B | 0,67 |        |

|  |  |             |    |             |               |
|--|--|-------------|----|-------------|---------------|
| <b>4 PENATAAN TATALAKSANA</b>                                |  | <b>1,00</b> |    | <b>0,55</b> | <b>54,67%</b> |
| <b>i. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)</b> |  | <b>0,50</b> |    | <b>0,30</b> | <b>59,33%</b> |
|  | a. Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis   |             | A  | 1,00        |               |
|  | b. Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi   |             | B  | 0,50        |               |
|  | c. Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi  |             | B  | 0,50        |               |
|  | d. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang   |             | B  | 0,67        |               |
|  | e. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)   |             | B  | 0,67        |               |
|  | f. Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP   |             | B  | 0,50        |               |
|  | g. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan   |             | B  | 0,67        |               |
|  | h. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi  |             | C  | 0,33        |               |
|  | i. Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi |             | B  | 0,50        |               |
| <b>ii. Keterbukaan Informasi Publik</b>                      |  | <b>0,50</b> |    | <b>0,25</b> | <b>50,00%</b> |
|  | a. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik  |             | Ya | 1,00        |               |
|  | b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik  |             | C  | 0,00        |               |
| <b>5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b>                       |  | <b>1,40</b> |    | <b>0,92</b> | <b>65,48%</b> |
| <b>i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan</b>        |  | <b>0,20</b> |    | <b>0,18</b> | <b>89,00%</b> |
|  | a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja   |             | A  | 1,00        |               |
|  | b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan   |             | A  | 1,00        |               |
|  | c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama  |             | B  | 0,67        |               |
| <b>ii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi</b>          |  | <b>0,20</b> |    | <b>0,10</b> | <b>50,00%</b> |
|  | a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi  |             | B  | 0,67        |               |

|                                  |   |             |    |             |               |
|----------------------------------|---|-------------|----|-------------|---------------|
|                                  | b. Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi             |             | C  | 0,33        |               |
| iii.                             | <b>Penetapan Kinerja Individu</b>   | 0,40        |    | 0,29        | 72,17%        |
|                                  | a. Penerapan Penetapan kinerja individu   |             | A  | 1,00        |               |
|                                  | b. Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi   |             | A  | 1,00        |               |
|                                  | c. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya                             |             | A  | 1,00        |               |
|                                  | d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik  |             | C  | 0,50        |               |
|                                  | e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.  |             | C  | 0,50        |               |
|                                  | f. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya |             | C  | 0,33        |               |
| iv.                              | <b>Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku</b>  | 0,20        |    | 0,07        | 33,50%        |
|                                  | a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan  |             | B  | 0,67        |               |
|                                  | b. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku  |             | C  | 0,00        |               |
| v.                               | <b>Pelaksanaan Evaluasi Jabatan</b>   | 0,20        |    | 0,08        | 41,50%        |
|                                  | a. Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)  |             | C  | 0,33        |               |
|                                  | b. Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ   |             | C  | 0,50        |               |
| vi.                              | <b>Sistem Informasi Kepegawaian</b>   | 0,20        |    | 0,20        | 100,00%       |
|                                  | - Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai   |             | Ya | 1,00        |               |
| <b>6 Penguatan Akuntabilitas</b> |   | <b>2,50</b> |    | <b>1,48</b> | <b>59,20%</b> |
| i.                               | <b>Keterlibatan pimpinan</b>  | 1,00        |    | 0,67        | 67,00%        |
|                                  | a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra  |             | B  | 0,67        |               |
|                                  | b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja  |             | B  | 0,67        |               |
|                                  | c. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala   |             | B  | 0,67        |               |
|                                  | d. Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah  |             | B  | 0,67        |               |
|                                  | e. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun  |             | B  | 0,67        |               |
|                                  | f. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala   |             | B  | 0,67        |               |



|                                       |   |      |       |      |        |
|---------------------------------------|---|------|-------|------|--------|
| ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja |   | 1,50 |       | 0,81 | 54,00% |
|                                       | a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja                            |      | C     | 0,33 |        |
|                                       | b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala   |      | B     | 0,75 |        |
| 7. PENGUATAN PENGAWASAN               |   | 2,20 |       | 0,53 | 23,89% |
| i. Gratifikasi                        |   | 0,30 |       | 0,04 | 12,50% |
|                                       | a. Telah dilakukan <i>public campaign</i>   |      | B     | 0,50 |        |
|                                       | b. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan   |      | Tidak | 0,00 |        |
|                                       | c. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi   |      | Tidak | 0,00 |        |
|                                       | d. Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti   |      | Tidak | 0,00 |        |
| ii. Penerapan SPIP                    |   | 0,30 |       | 0,00 | 0,00%  |
|                                       | a. Telah mengidentifikasi lingkungan pengendalian   |      | C     | 0,00 |        |
|                                       | b. Telah dilakukan penilaian risiko unit kerja  |      | D     | 0,00 |        |
|                                       | c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi               |      | D     | 0,00 |        |
|                                       | d. Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait |      | D     | 0,00 |        |
|                                       | e. Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern   |      | C     | 0,00 |        |
|                                       | f. Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI   |      | D     | 0,00 |        |
| iii. Pengaduan Masyarakat             |   | 0,50 |       | 0,06 | 11,00% |
|                                       | a. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti  |      | C     | 0,33 |        |
|                                       | b. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat  |      | C     | 0,00 |        |
|                                       | c. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti                                |      | Tidak | 0,00 |        |
| iv. Whistle Blowing System            |   | 0,30 |       | 0,00 | 0,00%  |
|                                       | - Whistle Blowing System telah disosialisasikan   |      | D     | 0,00 |        |
| v. Penanganan Benturan Kepentingan    |   | 0,30 |       | 0,10 | 33,25% |
|                                       | a. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan   |      | C     | 0,33 |        |
|                                       | b. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan  |      | Ya    | 1,00 |        |
|                                       | c. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan  |      | C     | 0,00 |        |
|                                       | d. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti                                |      | D     | 0,00 |        |

|  |             |    |             |               |
|--|-------------|----|-------------|---------------|
| ii. Pembangunan Zona Integritas  | 0,50        |    | 0,33        | 66,67%        |
| a. Telah dilakukan pencaangan Pembangunan zona integritas level unit kerja   |             | Ya | 1,00        |               |
| b. Telah dilakukan pembangunan zona integritas   |             | B  | 0,50        |               |
| c. Telah dilakukan evaluasi atas pembangunan zona integritas   |             | B  | 0,50        |               |
| <b>iii. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>  | <b>2,50</b> |    | <b>1,05</b> | <b>41,91%</b> |
| <b>1. Standar Pelayanan</b>  | <b>0,40</b> |    | <b>0,23</b> | <b>58,33%</b> |
| a. Terdapat kebijakan standar pelayanan  |             | B  | 0,75        |               |
| b. Standar pelayanan telah dimaklumkan   |             | A  | 1,00        |               |
| c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan  |             | D  | 0,00        |               |
| <b>2. Budaya Pelayanan Prima</b>   | <b>0,40</b> |    | <b>0,16</b> | <b>38,83%</b> |
| a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima |             | C  | 0,33        |               |
| b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media  |             | B  | 0,67        |               |
| c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan                             |             | C  | 0,33        |               |
| d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar              |             | D  | 0,00        |               |
| e. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi  |             | B  | 0,67        |               |
| f. Telah terdapat inovasi pelayanan  |             | C  | 0,33        |               |
| <b>3. Pengelolaan Pengaduan</b>  | <b>0,60</b> |    | <b>0,08</b> | <b>12,50%</b> |
| a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan   |             | C  | 0,50        |               |
| b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan   |             | D  | 0,00        |               |
| c. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan                 |             | D  | 0,00        |               |
| d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi   |             | C  | 0,00        |               |
| <b>iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan</b>   | <b>0,70</b> |    | <b>0,35</b> | <b>50,00%</b> |
| a. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan   |             | C  | 0,50        |               |
| b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka   |             | A  | 1,00        |               |
| c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat   |             | D  | 0,00        |               |
| <b>v. Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>  | <b>0,40</b> |    | <b>0,23</b> | <b>58,50%</b> |
| a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan   |             | B  | 0,67        |               |

|  |   |       |         |       |        |
|--|---|-------|---------|-------|--------|
|  | b. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus |       | B       | 0,50  |        |
| <b>K. REFORM</b>   |   | 21,70 |         | 11,44 | 52,73% |
| <b>1. MANAJEMEN PERUBAHAN</b>  |   | 3,00  |         | 0,92  | 30,50% |
| <b>i. Komitmen dalam Perubahan</b>   |   | 1,50  |         | 0,00  | 0,00%  |
| a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di instansi   |   |       | 0,00%   | 0,00  |        |
| - Jumlah Agen Perubahan  |   |       | 12,00   |       |        |
| - Jumlah Perubahan yang dibuat   |   |       | 0,00    |       |        |
| b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen  |   |       | 0,00%   | 0,00  |        |
| - Jumlah Perubahan yang dibuat   |   |       | 0,00    |       |        |
| - Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen  |   |       | 0,00    |       |        |
| <b>ii. Komitmen Pimpinan</b>   |   | 1,00  |         | 0,75  | 75,00% |
| - Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan  |   |       | B       | 0,75  |        |
| <b>iii. Membangun Budaya Kerja</b>   |   | 0,50  |         | 0,17  | 33,00% |
| - Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari  |   |       | C       | 0,33  |        |
| <b>2. DEREGULASI KEBIJAKAN</b>   |   | 2,00  |         | 1,50  | 75,00% |
| - Peran Kebijakan  |   | 2,00  |         | 1,50  | 75,00% |
| a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya   |   |       | B       | 0,50  |        |
| b. Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja   |   |       | 100,00% | 1,00  |        |
| - Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan baru yang terbit   |   |       | 1,00    |       |        |
| - Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi  |   |       | 1,00    |       |        |
| <b>3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI</b>  |   | 1,50  |         | 0,75  | 50,00% |
| - Organisasi Berbasis Kinerja  |   | 1,50  |         | 0,75  | 50,00% |
| - Penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan. |   |       | B       | 0,50  |        |

|  |  |             |         |             |                |
|--|--|-------------|---------|-------------|----------------|
| <b>4. PENATAAN TATALAKSANA</b>   |  | <b>3,75</b> |         | <b>1,65</b> | <b>43,93%</b>  |
| <b>i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan</b>   |  | <b>0,50</b> |         | <b>0,34</b> | <b>67,00%</b>  |
| - Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan  |  |             | B       | 0,67        |                |
| <b>ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang</b>   |  | <b>1,25</b> |         | <b>0,31</b> | <b>25,00%</b>  |
| a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien              |  |             | B       | 0,50        |                |
| b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien |  |             | C       | 0,00        |                |
| <b>iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat</b>  |  | <b>2,00</b> |         | <b>1,00</b> | <b>50,00%</b>  |
| a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal        |  |             | C       | 0,50        |                |
| b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal  |  |             | C       | 0,50        |                |
| c. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal           |  |             | C       | 0,50        |                |
| <b>5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b>  |  | <b>2,00</b> |         | <b>1,25</b> | <b>62,50%</b>  |
| <b>i. Kinerja Individu</b>   |  | <b>1,00</b> |         | <b>0,50</b> | <b>50,00%</b>  |
| - Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya  |  |             | B       | 0,50        |                |
| <b>ii. Assessment Pegawai</b>  |  | <b>0,50</b> |         | <b>0,25</b> | <b>50,00%</b>  |
| - Hasil assessment telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai  |  |             | B       | 0,50        |                |
| <b>iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai</b>   |  | <b>0,50</b> |         | <b>0,50</b> | <b>100,00%</b> |
| - Penurunan pelanggaran disiplin pegawai   |  |             | 100,00% | 1,00        |                |
| - Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya  |  |             | 0,00    |             |                |
| - Jumlah pelanggaran tahun ini   |  |             | 0,00    |             |                |
| - Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman   |  |             | 0,00    |             |                |
| <b>6. PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>  |  | <b>3,75</b> |         | <b>1,62</b> | <b>43,27%</b>  |
| <b>i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran</b>   |  | <b>1,00</b> |         | <b>0,38</b> | <b>37,50%</b>  |
| - Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien   |  |             |         |             |                |
| - Jumlah Program/Kegiatan yang ada sebelumnya:   |  |             |         |             |                |
| - Jumlah program   |  |             | 3,00    |             |                |
| - Jumlah kegiatan  |  |             | 20,00   |             |                |

|  |   |      |         |      |         |
|--|---|------|---------|------|---------|
|  | - Jumlah Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:  |      |         |      |         |
|  | - Jumlah program  |      | 3,00    |      |         |
|  | - Jumlah kegiatan   |      | 20,00   |      |         |
|  | - Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih   |      | 75,00%  | 0,75 |         |
|  | - Jumlah Sasaran Kinerja  |      | 8,00    |      |         |
|  | - Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih  |      | 6,00    |      |         |
|  | - Persentase Anggaran yang berhasil difocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:   |      | 0,00%   | 0,00 |         |
|  | - Jumlah Anggaran Total   |      | #####   |      |         |
|  | - Jumlah Anggaran yang berhasil difocussing   |      | -       |      |         |
|  | <b>ii. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja</b>   | 1,00 |         | 0,67 | 67,00%  |
|  | - Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran  |      | B       | 0,67 |         |
|  | <b>iii. Pemberian Reward and Punishment</b>   | 1,00 |         | 0,33 | 33,00%  |
|  | - Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment oleh unit kerja                         |      | C       | 0,33 |         |
|  | <b>iv. Kerangka Logis Kinerja</b>   | 0,75 |         | 0,25 | 33,00%  |
|  | - Terdapat Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai |      | C       | 0,33 |         |
|  | <b>7. PENGUATAN PENGAWASAN</b>  | 1,95 |         | 1,29 | 66,05%  |
|  | <b>L. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat</b>  | 0,75 |         | 0,75 | 100,00% |
|  | - Persentase penyampaian LHKPN  |      | 100,00% | 1,00 |         |
|  | - Jumlah yang harus melaporkan  |      | 20,00   |      |         |
|  | - Eselon I/II   |      | 3,00    |      |         |
|  | - Lainnya   |      | 17,00   |      |         |
|  | - Jumlah yang sudah melaporkan  |      | 20,00   |      |         |
|  | <b>II. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil</b>  | 0,60 |         | 0,54 | 89,66%  |
|  | - Persentase penyampaian LHKASN   |      | 89,66%  | 0,90 |         |
|  | - Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)  |      | 174,00  |      |         |
|  | - Jumlah Eselon III   |      | 0,00    |      |         |
|  | - Jumlah Eselon IV  |      | 0,00    |      |         |
|  | - Jumlah Fungsional dan Pelaksana   |      | 174,00  |      |         |
|  | - Jumlah yang sudah melaporkan  |      | 156,00  |      |         |

|  |             |        |             |               |
|--|-------------|--------|-------------|---------------|
| ii. Penanganan Pengaduan Masyarakat  | 0,60        |        | 0,00        | 0,00%         |
| - Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat   |             | 0,00%  | 0,00        |               |
| - Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti   |             | 0,00   |             |               |
| - Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses   |             | 0,00   |             |               |
| - Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti   |             | 0,00   |             |               |
| <b>4. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>  | <b>3,75</b> |        | <b>2,47</b> | <b>65,88%</b> |
| i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik   | 2,50        |        | 1,63        | 65,32%        |
| a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada:<br>1. Kesesuaian Persyaratan<br>2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur<br>3. Kecepatan Waktu Penyelesaian<br>4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis<br>5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan<br>6. Kompetensi Pelaksana/Web<br>7. Perilaku Pelaksana/Web<br>8. Kualitas Sarana dan prasarana<br>9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |             | B      | 0,67        |               |
| b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah:<br>1. Waktu lebih cepat<br>2. Alur lebih pendek/singkat<br>3. Terintegrasi dengan aplikasi  |             | 63,64% | 0,64        |               |
| - Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar  |             | 11,00  |             |               |
| - Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah   |             | 7,00   |             |               |
| ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi  | 1,25        |        | 0,84        | 67,00%        |
| - Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab   |             | B      | 0,67        |               |